BAB II

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA NEGARA MADURA TAHUN 1948

A. Biografi Singkat R.A.A Tjakraningrat

Jarang sekali sejarawan yang mengulas mengenai biografi R.A.A Tjakraningrat, sehingga banyak *statement* publik menyatakan bahwa pembentukan Negara Madura adalah sejarah yang terlupakan. Akan tetapi ada beberapa sumber dari internet menulis genelogi dari R.A.A Tjakraningrat, sehingga dapat diperoleh hasil:

nama	: Raden Adipati Ario Tjakraningrat
lahir	:1886
meninggal	: (tanggal dan lokasi tidak diketahui)
hubungan keluarga	: anak dari pangeran Tjakradiningrat. Suami dari Ray. Ayu Saleha Tjakraningrat, Aisyah Tjakraningrat dan tidak diketahui namanya. Ayah dari MR. R.A.M SIS Tjakraningrat, R.A.A Roeslan Tjakraningrat, M. Zainal Tjakraningrat dan M. Pratanu Tjakraningrat. Saudara dari R.A.A Soerjonegoro.
informan	: Mohammad Andree Tjakraningrat
terakhir *update*	: 9 Desember 2014.[1]

[1]Mohammad Andree Tjakraningrat, "Geni.com", dalam http://www.googleweblight.com atau?lite_url (17 November 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperkirakan usia R.A.A Tjakraningrat ketika menjabat sebagai wali Negara Madura sekisar umur 62 tahun.

B. Peran R.A.A Tjakraningrat dalam Terbentuknya Negara Madura

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha mendapatkan kembali bekas daerah jajahannya ini, baik secara terang-terangan maupun dengan membonceng tentara sekutu yang datang di Indonesia. Selang beberapa waktu kemudian Belanda berhasil menduduki beberapa kota besar dan mendirikan pemerintahan terhadap daerah yang didudukinya. Akan tetapi usaha Belanda tersebut mendapat perlawanan keras dari rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia, Belanda menggunakan strategi atau siasat untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Belanda ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara federal atau Negara bagian dalam Indonesia serikat. Untuk maksud tersebut maka didirikanlah Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatra Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948).[2]

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dikumandangkan, di wilayah Madura sedikit terlambat untuk mengetahui kemerdekaan Republik Indonesia dikarenakan buruknya sarana komunikasi di wilayah itu. Baru setelah terdengar pidato Presiden Soekarno di radio yang

[2]Machfudi Mangkudilaga, *Ikhtisar Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1980), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi intruksi pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah dan Badan Keamanan Rakyat di setiap kebupatian barulah terlihat luapan kegembiraan di wajah rakyat Madura. Pada tanggal 25 Agustus bekas PETA, *heiho* serta bersama-sama barisan kepolisian berpawai berkeliling kota dan berkumpul di Pamekasan, Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan tekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan tahun 1945.

Untuk memperlancar roda kehidupan secepatnya maka aparat pemerintahan peninggalan Belanda yang dipertahankan Jepang dibiarkan berfungsi terus, wakil *Syuchokan* Tjakraningrat diangkat sebagai residen Madura, tetapi kursi asisten yang duluh diduduki orang Belanda atau Jepang dikosongkan. Dengan demikian Bupati Bangkalan, Pamekasan (meliputi Sampang) dan Sumenep menjadi pengelola tunggal wilayahnya. Para bupati ini dibantu oleh patih atau wedana dan asisten wedana serta kepala desa untuk mengatur pelbagai peringkat pemerintahan wilayahnya.[3]

Setelah pemindahan kekuasaan terlaksana, bekas tentara dan aparat pemerintahan pendudukan Jepang segera diamankan, hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan mereka dari amukan rakyat Madura yang masih memiliki dendam, tawanan perang itu untuk sementara diinapkan dalam penjara sesuai keputusan pihak sekutu. Inggris dan Australia yang akan bertugas menangani pelucutan senjata tentara Jepang serta memulangkan

[3]Rifai, *Lintasan Sejarah Madura*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang sekutu bekas tawan Jepang, untuk pemulihan ketertiban negara akan diserahkan kepada pemerintahan sipil.[4]

Selang beberapa waktu ketengangan mulai kembali muncul karena tentara sekutu diboncengi tentara kerajaan Belanda dan *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). NICA adalah aparat pemerintah Belanda yang dibentuk di Australia bulan Desember 1944, NICA berhasrat untuk tetap membuat Indonesia sebagai Hindia Belanda. Keikutsertaan mereka dengan sendirinya bertujuan untuk mempertahankan *status quo* seperti keadaan sebelum perang.

Keadaan menjadi semakin gawat karena bekas *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL, tentara kerajaan Hindia Belanda) yang baru dibebaskan dari interniran Jepang segera dipersenjatai kembali. Akibatnya terjadi bentrokan yang tidak dapat terhindar antara pihak pejuang dan tentara sekutu yang diboncengi Belanda. Setelah pihak sekutu melihat kemantapan pemimpin Indonesia yang menangani situasi terutama dalam membantu menjaga ketertiban umum sehubungan dengan tawanan perang menyebabkan panglima tentara Inggris terpaksa memberikan pengakuan *de facto* kepada pemerintah Republik Indonesia.

Sementara itu badan keamanan rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 diresmikan menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dalam proses perapian organisasi militer untuk keperluan perjuangan di Madura dibentuklah dua resimen, pertahanan Madura Barat diserahkan kepada resimen 35 Mayangkara

[4]Ibid.,75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Asmarayuda seorang bekas Kapten Korps barisan, sementara itu di wilayah Madura Timur dibentuk resimen 36 Jokotole yang dikomandani Letnan Kolonel Chandra Hasan bekas *chudanchho* (komandan kompi atau kapten) PETA.

Pada tahun 1946 awal mula Belanda melirik wilayah Madura, Belanda mulai mengincar Madura karena kestrategisan lokasinya dalam mengamankan pangkalan armada di Surabaya. Akhirnya mereka berhasrat ingin kembali ke Madura dengan alasan akan melindungi rakyat dari tekanan tentara serta membantu mengatasi kekurangan pangan di Madura Barat. Setelah mengadakan pengintaian udara, pada tanggal 5 Juli 1946 enam tank amfibi mendarat di Kamal dengan dilindungi pesawat pemburu Mustang. Akan tetapi, terjadi perlawanan oleh pejuang Madura setempat yakni Letnan Mohammad Ramli, Abdullah dan Singasastra. Tiga pemuda tersebut gugur setelah mencoba melakukan penyerangan hanya dengan senjata seadanya seperti keris dan pistol. Melihat gigihnya perlawanan tentara pejuang, untuk sementara Belanda mengurungkan niatnya untuk menduduki wilayah Madura. Akhirnya untuk memperlemah daya perlawanan rakyat dan merongrong wibawah pemerintah Republik Indonesia, Belanda terus melakukan provokasi dan memulai blokade ekonomi terhadap Madura[5].

Dalam upaya mewujudkan rencananya menguasai kembali Indonesia, Belanda mengokohkan genggamannya atas Kalimantan dan Indonesia bagian Timur dengan membentuk negara-negara boneka. Karena tekanan

[5]Mangkudilaga, *Ikhtisar Tata Negara Republik Indonesia*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional maka jalan diplomasi terpaksa ditempuh oleh pemerintah Belanda. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 melahirkan perjanjian Linggarjati yang berisi butir-butir yang menyatakan bahwa Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia berkuasa atas Sumatra, Jawa, dan Madura. Kedua pihak bersetuju untuk bersama-sama mendirikan Negara Indonesia serikat yang berbentuk negara federasi. Kedua pemerintahan akan terus bekerja sama untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai ratu Belanda.

Setelah Perjanjian Linggarjati secara resmi disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda yang pada waktu itu sedang berselisih. Namun pada kenyataannya Belanda masih terus berusaha untuk melaksanakan politiknya untuk menguasai Indonesia. Pada suatu saat Belanda mengeluarkan interprestasi atas bunyi Perjanjian Linggarjati tersebut, yang sangat sukar diterimaoleh Republik Indonesia. Menurut interpretasinya, sebelum Negara Indonesia Serikat terbentuk nanti pada tanggal l Januari l949, maka harus dibentuk pemerintahan peralihan di Indonesia yangdikepalai oleh Wakil Tinggi Mahkota. Interprestasi ini ditulis dalam suatu nota yang kemudian disampaikan kepada pemerintah RI pada tanggal 27 Mei l947. Nota ini ditolak oleh RI, sebab dirasa tidak sesuai dengan jiwa Perjanjian Linggarjati. Sementara itu bangsa Indonesia pada saat yang bersamaan baru terjadi krisis kabinet di Yogyakarta dengan jatuhnya Kabinet Syahrir yang kemudian digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli l947.[6]

[6] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesempatan ini digunakan oleh van Mook pada tanggal 20 Juli l947 untuk mengumumkan sikapnya dengan menyatakan bahwa Belanda tidak mau lagi berunding dan menyatakan tidak terikat lagi dengan isi Perjanjian Linggarjati.

Pada tanggal 2l Juli l947 van Mook melancarkan agresi militer ke wilayah RI. Agresi ini dikenal dalam sejarahsebagai Agresi Militer Belanda I. Agresi ini direncanakan oleh van Mook untuk melancarkan niatnya mendirikan negara-negara bagian di wilayah-wilayah hasil agresi itu. Negara bagian pertama yang diciptakan van Mook pada tanggal 24 Desember l946 adalah Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Perjanjian Linggarjati NIT diakui sebagai negara tersendiri. NIT dipilih sebagai daerah tempat negara bagian pertama yang dibentuk dengan pertimbaangan karena kekuatan militer Belanda di daerah ini relatif besar. Selain itu Belanda berpendapat bahwa gagasan negara federal akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi rakyat di luar pulau Jawa, yang jumlahnya jauh lebih besar. Pada salah satu kesempatan van Mook pernah mengemukakan perbedaan antara sistem *uniterisme* dan *federalisme*. Dalam sistem *uniterisme* biaya pemerintahan akan menjadi lebih murah daripada sistem federal, tetapi akan timbul bahaya bahwa satu bagian akan dapatmenguasai bagian lainnya. Dalam keadaan demikian perpecahan mungkin akan timbul. Oleh karena itu sistem federal dalam susunan ketatanegaraan akan lebih baik, tetapi dengan suatus syarat bahwa bagian-bagian yang merupakan komponen dari federasi itu haruslah merupakan wilayah-wilayah yang luas dan memiliki potensi ekonomi, sosial, dan politik yang mantap. Menurutnya sistem yang cocok untuk diterapkan di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sistem federal. NIT sebagai negara bagian pertama yang didirikan, menurutnya memiliki potensi yang sangat besar baik darisegi ekonomi maupun kebudayaan. Van Mook yakin bahwa NIT akan dapat menjelma menjadi suatu negara yang mempunyai daya hidup yang kuat dan akan dapat mengembangkanidentitasnya sendiri sehingga akan berhasil menjadi bagian yang berharga dari federasi Indonesia.[7]

Langkah van Mook ini kemudian dilanjutkan dengan mendirikan negara-negara bagian yang lainnya seperti: Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Jawa Timur. Di samping mendirikan negara-negara bagian ia jugamembentuk daerah-daerah otonom seperti: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar,Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Dengan berhasilnya membentuk negara-negara bagian ini menandakan pula keberhasilan Belanda dalam menjalankan politik *devide et imperanya.*

Akan tetapi persetujuan ini tidak bertahan lama karena perbedaan penafsiran antara pihak Belanda dan Indonesia. Belanda terus merongrong wibawa Republik Indonesia dengan menuntut melakukan kegiatan kepolisian bersama dalam wilayah Republik Indonesia. Sebenarnya pemerintah Belanda mengalami kesulitan keuangan yang gawat untuk membiayai kegiatan tentara pendudukannya di Indonesia. Belanda harus segera menguasai daerah yang dapat menghasilkan devisa untuk menutupi keperluan dana akomodasi yang

[7]Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar. Negara Eropa saat itu masih mengalami krisis akibat pendudukan Jerman selama Perang Dunia II, sehingga Belanda mencari dalih untuk menduduki wilayah perkebunan yang luas di Jawa Barat, ujung Timur Jawa Timur dan Deli di Sumatra Utara. Begitu juga mereka harus menguasai ladang serta kilang minyak disekitar Palembang dengan alasan mengatasi gangguan keamanan oleh gerombolan pemuda ekstremis, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan serangan militer ke dalam wilayah Republik Indonesia. kegiatan yang disebut aksi polisi itu berhasil menduduki daerah perkebunan dan kota-kota strategis yang diincarnya karena secara ekonomi sangat menguntungkan.

Pada tanggal 4 Agustus 1947 sekitar pukul 02.30 WIB pagi pasukan Belanda melakukan pendaratan di Bima dengan kekuatan 7 tank dan 14 truk. Tetapi mendapat perlawanan sengit dari tentara setempat akhirnya pasukan musuh (tentara Belanda) mundur. Selang beberapa jam sekitar pukul 09.00 WIB pagi pasukan musuh melakukan pendaratan di Kisih, bergerak ke Labang, Djambu, Tundjung terus ke kota Bangkalan.[8]

Pasukan RI mundur di daerah Arosbaya (14 Km dari kota Bangkalan). Strategi dan konsolidasi terus dilaksanakan untuk mengadakan perlawanan kembali kedalam kota dengan sistem perang gerilya. Serangan dilaksanakan pada malam dan siang hari pada tanggal 18 Agustus 1947 (hari lebaran) tetapi

[8] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat pukulan balik dari musuh dengan kekuatan 2 truk dan 1 tank. Musuh terpaksa mundur.[9]

Meskipun Madura tidak memiliki sumber daya yang dapat mendatangkan perbendaharaan perang bagi Belanda, akan tetapi Belanda tetap memprioritaskan penguasaan atas pulau itu. Tujuan utamanya hanyalah mendirikan Negara Madura sebagai sekutu baru, selain itu Belanda bermaksud merekrut pasukan yang dapat dipakai sebagai tentara pendudukan. Belanda membutuhkan pasukan dari Madura yang difungsikan sebagai pasukan teritorial dan pemelihara ketertiban di wilayah yang dikuasainya seperti dalam politik *devide et empera.* Hal ini memicu semangat Belanda untuk tetap berniat menduduki pulau Madura, sehingga untuk menyerang dan melumpuhkan Madura Belanda telah mempersiapkan sekitar satu resimen tentara terdiri atas satuan pasukan KL, KNIL dan *veiligheids brigade* (vb, semacam polisi tentara rahasia) dan juga Belanda telah menyiapkan satu batalion khusus berupa pasukan Cakra yang dipimpin kapten Muhni seorang bekas perwira bekas korps barisan.

Tentara pejuang di Bangkalan yang mengatur garis pertahanan baru segera menghadapi berbagai tekanan. Sesudah beberapa minggu keadaan semakin memburuk. Karena itu diputuskan untuk meneruskan perjuangan di tempat lain dengan berhijrah secara diam-diam, diantaranya Wedana Arosbaja, *chudancho* Mohammad Noer yang berhijrah ke Jawa dengan tugas mengepalai pemerintahan Republik Indonesia untuk wilayah Madura dalam

[9]Surat dari kantor Gubernur Jawa Timur di Blitar a/n. Pegawai tinggi dpbk Rooslan Wongsokoesoemo kepada kementrian Jawa Timur di Blitar tentang pertempuran dan pendaratan di Madura Barat (Bangkalan) tanggal 8 september 1947 (*Algemeene Secretarie*, No.1265).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan di Kediri dan Kyai Haji Amin Jakfar ditunjuk mengkoordinasi kelaskaran Madura di Jawa.

Residen Madura Tjakraningrat tidak melakukan tindakan seperti pejuang lain, dengan menggunakan alasan kesehatan ia meminta berhenti sebagai pejabat Republik Indonesia. Ternyata ia sudah mengakui kekuasaan *Regerings Commisaris voor bestuurangelgenheden* (recomba, Komisi Pemerintahan untuk masalah Administrasi Pemerintahan) Belanda atas Madura. Karena itu oleh pemerintah Belanda ia diangkat menjadi satu-satunya penguasa di pulau itu.

Tindakan Tjakraningrat tersebut antara lain didasarkan pada tuduhannya bahwa pemerintah Republik sudah tidak lagi menghormati demokrasi, dengan dalih bahwa orang Madura ingin diperintah suku bangsanya sendiri, ia menyanggupi akan mendirikan Negara Madura yang dianggapnya sesuai dengan Perjanjian Linggarjati. Bahkan ia menyatakan bersedia menandatangani kontrak keterikatan politik seperti leluhurnya di abad ke-18 dan ke-19 untuk menempatkan Madura dibawah lindungan Belanda.[10]

Dalam menjelaskan mengapa beberapa pemimpin lokal Madura seperti Tjakraningrat memiliki keinginan untuk mendirikan Negara Madura yang terlepas dari Negara RI yang berpusat di Jawa, sebenarnya dapat dijelaskan dalam hubungannya antara penguasa Madura dan Jawa (khususnya Mataram) pada masa kerajaan. Meskipun secara geografis wilayah Madura terpisah

[10] Ibid., No.1265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Jawa. Namun, secara politis Madura pada jaman kerajaan selalu berada di bawah kerajaan-kerajaan besar di Jawa terutama Mataram. Madura pada waktu itu bukanlah sebagai wilayah yang bebas dari kekuasaan Jawa bahkan harus tunduk pada kekuasaannya.

Ketakutan terhadap dominasi Jawa ini rupanya menjadi beban sejarah yang terus teringat oleh para pemimpin lokal Madura, ketika ia harus memilih menuruti keinginan Belanda untuk memisahkan diri dengan membentuk negara sendiri terpisah dari RI atau memilih bergabung dengan RI sebagai negara kesatuan yang juga berpusat di Jawa. Dengan kata lain masalah Jawanisasi menjadi pertimbangan ketika mereka harus memutuskan untuk masalah ini. Konflik antara pemimpin di Madura dengan penguasa di Jawa pada masa kerajaan seringkali terjadi. Ketika wilayah Madura di kuasai oleh kerajaan Mataram, selain sebagai wilayah yang tidak bebas juga banyak dibebani oleh berbagai penyerahan dan pajak yang sangat tinggi. Beban penyerahan wajib tersebut tidak mustahil menjadi penyebab utama mengenai sikap penguasa Madura seperti Trunajaya, Cakraningrat II, Cakraningrat III, dan Cakraningrat IV untuk berusaha melepaskan diri dari kekuasaan yang ada di Jawa (Mataram).[11]

Tindakan untuk memisahkan diri para penguasa Madura dari dominasi ikatan kerajaan Mataram itu tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi di pulau itu.Meskipun secara geografishampir seluruh Madura terdiri dari tanah kapur sebagai bagian dari pegunungan kapur utara dibagian utara Jawa Timur, tetapi

[11]Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-daerah pada periode akhir Mataram (1726 -1745)* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 253-254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampaknya pada awal abad ke-l8 Madura merupakan pulau yang makmur. Hal ini terbukti di pulau ini terdapat tidak kurang dari lima kota yang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya nya bila dibandingkan perkembangan beberapa kota di Jawa kondisinya tidak jauh berbeda. Beban sejarah kedua yang memiliki pengaruh besar bagi beberapa pemimpin lokal Madura lebih tertarik untuk mengadakan kerjasama dengan Belanda dan mau untuk mendirikan negara sendiri dari pada bergabung dengan RI yang ada di Jawa adalah hubungan yang sudah dilakukan keduanya selama itu. Dalam sejarah ketika mereka konflik dengan penguasa Jawa, maka pemimpin Madura akan memilih alternatif untuk minta bantuan Belanda. Kerjasama antara Belanda dengan pemimpin Madura salah satunya dapat dilihat pada organisasi militer yang dikenal dengan nama Barisan Madura. Organisasi barisan ini merupakan suatu pasukan militer yang keberadaannya diterima dengan adanya hubungan militer antara penguasa Madura dengan Belanda.

Sejarah aliansi militer antara Madura dan Belanda dimulai pada tahun-tahun awal Belanda masuk ke Madura. Pada saat itu pula kebetulan kerajaan-kerajaan Madura sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Mataram. Usaha ini mendapat respon positif dan perlindungan dari Belanda. Sebagai gantinya maka kekuatan-kekuatan militer Madura diminta untuk mendampingi Belanda selama menghadapi berbagai pemberontakan, seperti Perang Diponegoro, Perang Bone, Perang Paderi, Perang Bali, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang-perang lainnya.[12] Atas penghargaan dalam membantu perang ini maka pemerintah kolonial sering memberikan penghargaan kepada sultan dan keluarganya. Bahkan, karena sangat cintanya kepada Belanda beberapa sultan ketika meninggal dunia berwasiat agar jenazahnya ditutupi dengan bendera Belanda.[13]

Pada tanggal 11 September 1947 pukul 06.30 WIB pagi pasukan Belanda melakukan serangan besar-besaran ke Madura, gerakan pasukan dimulai dari Pakong, Distrik Pegantenan dengan kekuatan satu kompi infanteri yang bertujuan menyerang Sumenep, pertempuran sengit terjadi antara rakyat Madura dengan tentara Belanda.

Sebelum melakukan serangan Belanda melakukan ofensif propaganda pada tanggal 1 November 1947 dengan taktik seolah-olah pasukan mereka ditarik mundur. Pada tanggal 9 November 1947 pasukan Belanda melakukan tipu muslihat dengan kapal perangnya mendekati dan menembaki Pasongsongan, Pasiyan dan Ambunten dan akhirnya Sumenep dapat diambil alih oleh musuh.[14]

Setelah mengkonsolidasi penduduknya atas Madura barat Belanda mulai mengusik Sumenep dengan menyatakan wilayah itu adalah daerah operasi patrolinya. Aksi militer Belanda yang merupakan genjatan senjata berdasarkan perjanjian Linggarjati itu membangkitkan kemarahan dunia

---

[12]Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 -1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 144.
[13]Zein, *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan pendekat an Historis dan Deskriptf* (Surabaya: ITS Surabaya, 1986), 29.
[14]Surat dari M.Gani tentang situasi militer di Madura tanggal 11 September 1947 (Arsip Kementrian Penerangan, No.99) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional. Dewan keamanan PBB ikut campur tangan sehingga tercapailah persetujuan baru yang ditandatangani di kapal perang Amerika serikat *Renville* pada tanggal 17 Januari 1948. Persetujuan itu mempersyaratkan bahwa tidak kurang dari enam bulan tetapi tidak lebih dari setahun sesudah tanggal tersebut akan diadakan plebesit atau pemungutan suara dibawah pengawasan PBB di wilayah pendudukan Belanda. Plebesit itu dimaksudkan untuk menentukan apakah rakyatnya tetap ingin ikut Republik Indonesia atau bergabung dengan negara bagian lain dalam suatu negara serikat.

Akan tetapi seminggu setelah perjanjian *Renville* Belanda mengadakan plebesit di Madura tanpa sepengetahuan komisi PBB (terdiri atas Amerika Serikat, Australia dan Belgia). Sebagai penguasa yang diangkat Belanda, Tjakraningrat membantu Recomba Jawa Timur dalam memaksa rakyat Madura menentukan: 1) dalam keadaan yang sulit ini apakah tidak lebih baik orang Madura mendirikan Negara sendiri yang menangani segala kebutuhan masyarakatnya, 2) bukankah sepantasnya Tjakraningrat diangkat dan dijadikan wali Negara Madura.[15]

Karena tidak ada berita radio atau surat kabar, tidak banyak orang Madura yang tahu bahwa Tjakraningrat telah meninggalkan kubu republik. Keterikatan nama Tjakraningrat dengan Negara Madura dianggap masih memiliki hubungan dengan Republik. Mereka yang mengetahui permasalahan ini juga sulit untuk menyatakan pendapat secara bebas karena plebesit yang dilakukan tersebut tidak diadakan secara langsung, bebas dan rahasia dengan

[15] *Algemeene Secretarie*, No.1265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawasi tentara pendudukan Belanda maka disetiap desa tempat penentuan pendapat dilakukan orang yang menyetujui dua pertanyaan tadi diminta berdiri di satu pihak, sedangkan orang yang abstain dan menentang pertanyaan tadi diharuskan berdiri di sisi lain yang telah disediakan. pemungutan suara dilaksanakan di tiap-tiap desa pada tanggal 23 Januari 1948, disana akan dijelaskan tentang maksud resolusi dan pemungutan suara. Pemungutan suara ini akan dilaksanakan serentak pada tanggal 23 Januari 1948 pukul 15.00 WIB sore sampai pukul 18.00 WIB sore. Hal ini memperoleh hasil:

1. Orang yang berhak memberikan suara : 305.546 orang
2. Orang yang hadir : 219.660 orang
3. Orang yang setuju : 199.510 orang
4. Orang yang tidak setuju : 9.923 orang
5. Orang yang tidak mengeluarkan suara : 10.230 orang

Kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Banyaknya yang hadir : 71,88%
2. Banyaknya orang yang setuju : 90.82%
3. Banyaknya orang yang tidak setuju : 4.51 %
4. Banyaknya orang yang tidak mengeluarkan suara : 4.65%

Di bawah tekanan tentara pendudukan seperti itu maka tidaklah mengherankan jika tidak sampai 5% suara yang menentang pendirian Negara Madura.[16]

[16]Surat dari Residen *Gedelegeerde Recomba* Madura kepada Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia tentang permohonan pengakuan kedudukan Madura tanggal 29 Januari 1948 (Arsip Kementrian Penerangan, No.99).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan *verslaag* dari T. Sumarto dari kementrian publikasi bagian pers Jogjakarta berpendapat bahwa pada tanggal 25 Januari 1948 di Madura telah didirikan partai seperti di Negara Jawa Timur, akan tetapi partai ini mendapat sambutan dari kalangan rakyat Madura yang berpusat di Kembang Djepun muka Escomto. Partai ini bernama PKM (Partai Kebangkitan Madura) yang diketuai oleh Asmorojudo, Akman cs, partai ini mendapat simpati karena rakyat Madura sebagian besar buta huruf dan tidak mengerti sama sekali maksud dari pembentukan partai itu. Rakyat Madura hanya diberitahu bahwa partai tersebut akan membawa kemerdekaan rakyat Madura dan membawa rakyat Madura kearah kebahagiaan dan kemakmuran serta partai tersebut mengadakan pelajaran (*scheepsvaart afdeeling)* dimana bagian ini mengurus pelajaran rakyat Madura yang datang dan pergi melalui PKM dan rakyat bukan anggota PKM tidak akna mendapatkan pertolongan. Hal ini yang menjadikan partai ini mendapat sambutan baik dari rakyat.[17]

Berdasarkan hasil plebesit yang sangat meyakinkan ini pada tanggal 21 Februari 1948 Letnan Gubernur Jenderal van Mook memberikan pengakuan berdirinya Negara Madura dan juga mengesahkan dan merestui pengangkatan Tjakraningrat sebagai wali Negara Madura.

Peran R.A.A Tjakraningrat dalam terbentuknya Negara Madura yakni ketika tanggal 16 Januari 1948 bertempat di kediaman Bupati Pamekasan membentuk sebuah komite penentuan kedudukan Madura yang tersusun sebagaimana komite sementara, terdiri dari utusan rakyat diseluruh

[17]*Verslaag* dari T. Sumarto tentang turunan surat rahasia dari Kementrian publikasi bagian Pers Jogjakarta tentang rapat komite persiapan pembentukan kedudukan Jawa Timur tahun 1948 (Arsip Kementrian Penerangan, No.159).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keresidenan Madura. Komite ini juga menetapkan sebuah resolusi yang berisikan meminta persetujuan rakyat dengan cara mengadakan pemungutan suara yang akan segera dibentuk disetiap desa diseluruh keresidenan Madura yang bertepat pada tanggal 23 Januari 1948 pukul 15.00 WIB sore. Pada tanggal 20 Februari 1948 R.A.A Tjakraningrat mendapat surat dari Dr. Van Mook yang berisikan sambutan baik dari pemerintah kerajaan Belanda mengenahi permohonan R.A.A Tjakraningrat dalam pembentukan komite penentuan kedudukan Madura.[18] Hasil dari resolusi itu memutuskan:

Pertama, memenuhi resolusi yang diterima oleh rakyat Madura pada tanggal 23 Januari 1948 mengakui Madura sebagai kesatuan ketatanegaraan yang disusun dengan kedudukan Negara . Kedua, menetapkan bahwa wilayah Negara Madura meliputi pulau Madura dan pulau sekitarnya. Ketiga, mengakui R.A.A Tjakraningrat, residen Madura sebagai wali Negara Madura. Keempat: membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Madura untuk mempersiapkan susunan ketatanegaraan Negara Madura dengan perjanjian bahwa:

1. Susunan Dewan yang pertama terdiri dari lima puluh anggota.
2. Empat puluh anggota akan dipilih menurut aturan yang ditunjukan oleh wali Negara dengan nama komite penentuan kedudukan Madura.
3. Sepuluh anggota akan dipilih menurut satuan yang ditetapkan oleh wali Negara dengan kata sepakat komite penentuan kedudukan Madura dan

[18]Surat dari Dr. van Mook kepada R.A.A Tjakraningrat tentang sambutan baik dari pemerintah kerajaan Belanda mengenahi pembentukan komite penentuan kedudukan Madura tgl 20 Februari 1948 (Arsip Kementrian Penerangan, No.99).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komisaris pemerintah untuk mewakili golongan penduduk yang tidak terwakili.

Kelima, menetapkan bahwa kewajiban istimewa dari dewan adalah secepat mungkin menguji team suatu rencana untuk susunan ketatanegaraan dari Negara dan persoalan hubungan Negara terhadap Negara Indonesia serikat yang akan dibentuk dan kerajaan Belanda dalam kerja sama dengan wali negara dan komisaris pemerintah untuk pamong praja Jawa Timur. Keenam, menetapkan bahwa sambil menanti pelaksanaan susunan ketatanegaraan dimaksudkan dalam pasal 5 wali negara menyelenggarakan kekuasaan kepadanya. Ketujuh, menetapkan bahwa anggaran belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan pekerjaan wali negara dan dewan, sementara waktu diberikan oleh negara .

Dalam pembicaraan pada sidang tanggal 16 Januari 1948 berpendapat bahwa sejak tanggal 11 November 1947 hubungan antara Madura dan pemerintah pusat Republik Indonesia telah terputus oleh karena sejak tanggal 21 November 1947 dengan alasan untuk kepentingan rakyat, Negara dan pemerintah diambil alih oleh R.A.A Tjakraningrat.[19]

Corak dari pemerintahan adalah pemerintahan sendiri dengan bekerjasama dengan pemerintahan umum. Pemerintah masih bersifat sementara sehingga ada ketentuan pasti tentang kedudukannya. Inti dari resolusi ini adalah: a) Rakyat Madura berhak berdiri dalam menentukan

[19]Ibid., No.99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasibnya sendiri. b) Sehubungan dengan keadaan politik Indonesia saat itu, mereka sudah saatnya untuk menentukan status kedudukan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id